



Determinan Sosio-Ekonomi terhadap Ketimpangan Pengeluaran: Analisis Data Panel Kabupaten/Kota di Provinsi DIY (2017-2023)

Abdau Badawi^{1,*}, Nabilah Sulistyowati¹

¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia

Article Information

Article History:

Submit: 20 Januari 2026

Revision: 20 April 2026

Accepted: 17 Mei 2026

Published: 30 Mei 2026

Keywords

Ketimpangan Pengeluaran; Indeks Pembangunan Manusia; Belanja Modal; PDRB; Data Panel

Correspondence

E-mail: abdaubadawi@gmail.com*

A B S T R A C T

Riset ini bertujuan untuk melakukan analisis dampak Indeks Pembangunan Manusia (IPM), belanja modal pemerintah daerah, serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap ketimpangan pengeluaran antar kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2017–2023. Riset ini memakai data panel yang memiliki sumber atas Badan Pusat Statistik serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Metode analisis yang dipakai ialah regresi data panel dengan model *Pooled Least Square* (PLS), dengan penerapan *Panel-Corrected Standard Errors* (PCSE) untuk mengatasi permasalahan heteroskedastisitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pengeluaran, sementara belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan. Di sisi lain, PDRB berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pengeluaran. Temuan ini membuktikan bahwasanya peningkatan kualitas pembangunan manusia serta tumbuhnya perekonomian belum sepenuhnya bersifat inklusif, sehingga diperlukan penguatan belanja modal dan kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi pada pemerataan wilayah.

Abstract

This study aims to analyze the effects of the Human Development Index (HDI), local government capital expenditure, and Gross Regional Domestic Product (GRDP) on expenditure inequality across regencies/municipalities in the Special Region of Yogyakarta during the 2017–2023 period. Panel data were obtained from Statistics Indonesia and the Directorate General of Fiscal Balance. The analysis employs panel data regression using the Pooled Least Squares (PLS) model, with Panel-Corrected Standard Errors (PCSE) applied to address heteroskedasticity. The results show that HDI positively and significantly affects expenditure inequality, while capital expenditure has a negative and significant effect. Meanwhile, GRDP has a negative but statistically insignificant effect on expenditure inequality. These findings indicate that improvements in human development quality and economic growth have not been fully inclusive, highlighting the need to strengthen capital expenditure and implement development policies that are more oriented toward regional equity.

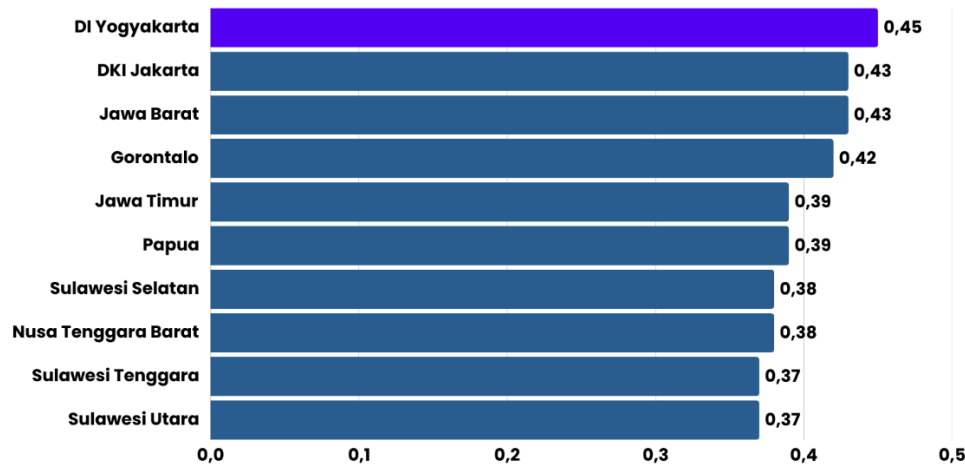
This is an open access article under the CC-BY-SA license



1. Pendahuluan

Ketimpangan pengeluaran merupakan kondisi tidak meratanya distribusi pendapatan antar rumah tangga dalam suatu wilayah. Di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran umumnya diukur menggunakan *Gini Ratio*, yang mencerminkan tingkat pemerataan distribusi pengeluaran

masyarakat. Aliyah dan Rahmawati (2024) menyatakan bahwa *Gini Ratio* digunakan sebagai indikator utama dalam mengukur ketimpangan distribusi pengeluaran. Badan Pusat Statistik memberi penjelasan bahwasanya nilai *Gini Ratio* berada pada rentang 0 hingga 1, yang mana nilai di bawah 0.4 memperlihatkan ketimpangan rendah, nilai antara 0.4 sampai 0.5 memperlihatkan ketimpangan sedang, sementara nilai melampaui 0.5 mengindikasikan ketimpangan tinggi. Indikator ini menjadi ukuran penting dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam menilai sejauh mana hasil pembangunan mampu dinikmati dengan cara merata oleh khalayak (Mangiri & Sasabone, 2023). Untuk memberikan gambaran empiris mengenai kondisi ketimpangan pengeluaran antarprovinsi di Indonesia, Gambar 1 menyajikan perbandingan nilai *Gini Ratio* di beberapa provinsi.



Gambar 1. Ketimpangan Pengeluaran Antarprovinsi Tertinggi di Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik, Maret 2023

Berlandaskan atas gambar 1, terlihat bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tingkatan ketimpangan pengeluaran yang relatif tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia, dengan nilai *Gini Ratio* sebesar 0.45 berlandaskan atas data Badan Pusat Statistik periode Maret 2023. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masingnya berada pada angka 0.43, serta beberapa provinsi lain seperti Jawa Timur dan Papua yang memiliki nilai ketimpangan di bawah 0.40. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun DIY dikenal sebagai daerah dengan tingkat pembangunan manusia yang relatif baik, distribusi pengeluaran masyarakatnya masih belum merata (Muslinawati & Sutrisno, 2024). Tingginya ketimpangan ini mengindikasikan adanya perbedaan akses pendapatan dan pengeluaran antar kelompok masyarakat, sehingga menjadikan DIY sebagai wilayah yang relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam analisis ketimpangan pengeluaran antar kabupaten/kota.

Fenomena tingginya ketimpangan tersebut tidak terlepas dari karakteristik struktural yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang relatif berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya disparitas struktur ekonomi antarwilayah, di mana wilayah perkotaan seperti Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman didominasi oleh sektor pendidikan, pariwisata, dan jasa yang relatif maju, sedangkan wilayah seperti Gunungkidul dan Kulon Progo masih bergantung pada sektor pertanian yang memiliki produktivitas lebih rendah. Kondisi ini menyebabkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak selalu diikuti oleh pemerataan kesejahteraan, karena kemajuan pembangunan manusia cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu (Pasulu & Mustika, 2025). Dengan demikian, fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam melihat bagaimana peningkatan kualitas pembangunan manusia justru berpotensi memperlebar ketimpangan pengeluaran antar kabupaten/kota di DIY.

Pemilihan variabel dalam penelitian ini didasarkan pada relevansinya terhadap dinamika ketimpangan di DIY. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia yang diduga memiliki hubungan dengan ketimpangan pengeluaran. Belanja modal dipilih karena mencerminkan peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang berpotensi memengaruhi distribusi kesejahteraan antarwilayah. Sementara itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan sebagai indikator aktivitas ekonomi daerah yang menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks DIY, pembangunan ekonomi dan alokasi belanja modal cenderung lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan seperti Kota Yogyakarta dan Sleman dibandingkan dengan wilayah pinggiran seperti Gunungkidul dan Kulon Progo, sehingga berpotensi memperbesar kesenjangan antarwilayah (Raharjo & Wirahayu, 2025).

Fenomena tingginya ketimpangan pengeluaran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana faktor pembangunan manusia, kapasitas fiskal daerah, dan aktivitas ekonomi berperan dalam mendorong atau mengurangi ketimpangan tersebut. Berdasarkan pemilihan variabel yang telah dijelaskan sebelumnya, ketiga faktor tersebut menjadi penting untuk dianalisis dalam konteks ketimpangan antarwilayah di DIY. Secara teoritis, ketimpangan pengeluaran sering kali berkorelasi dengan kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah. Aliyah dan Rahmawati (2024) menyatakan bahwasanya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki peranan krusial guna memengaruhi ketimpangan pengeluaran lewat kenaikan mutu SDM. Di sisi lain, Juliana dan Soelistyo (2021) menemukan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) turut memengaruhi dinamika ketimpangan pengeluaran antar wilayah. Namun demikian, temuan empiris di berbagai daerah menunjukkan hasil yang belum konsisten, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut pada konteks wilayah tertentu.

Berdasarkan kondisi tersebut, masalah pokok pada riset ini ialah bagaimana dan sejauh mana IPM, belanja modal, serta PDRB memengaruhi ketimpangan pengeluaran antar kabupaten ataupun kota dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Permasalahan tersebut menjadi relevan mengingat meskipun pembangunan ekonomi dan kualitas manusia di DIY relatif tinggi, ketimpangan pengeluaran masih tergolong besar. Perbedaan karakteristik ekonomi daerah, variasi alokasi belanja publik, serta ketimpangan akses terhadap layanan dan peluang ekonomi diduga menja di faktor yang memperkuat disparitas antar wilayah (Canina et al., 2022).

Riset ini mempunyai tujuan guna mengidentifikasi dan mengukur dampak variabel sosial dan ekonomi utama terhadap ketimpangan pengeluaran di tingkat regional. Dengan menggunakan data panel seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi DIY dalam jangka waktu tujuh tahun, riset ini mampu menangkap variasi antar wilayah dan perubahan antar waktu secara simultan. Hasil riset ini harapannya mampu memberi kontribusi empiris terhadap literatur ketimpangan regional, sekaligus berperan sebagai dasar pertimbangan untuk pemerintah daerah ketika merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

2. Metode Penelitian

Riset ini ialah riset kuantitatif yang memakai metode analisis regresi data panel dengan memanfaatkan data sekunder. Data penelitian didapatkan melalui Badan Pusat Statistik serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Provinsi DIY. Pendekatan regresi data panel digunakan karena mampu mengombinasikan dimensi waktu dan dimensi antarwilayah dalam satu kerangka analisis, sehingga dapat menangkap perbedaan karakteristik antar kabupaten/kota serta perubahan kondisi sosial dan ekonomi di setiap tahunnya (Purnama et al., 2024). Dalam model yang digunakan, Indeks *Gini* berperan selaku variabel dependen, sedangkan IPM, belanja modal, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan selaku variabel independen. Model ekonometrika pada riset ini dilakukan perumusan di bawah ini.

$$Gini_{it} = \alpha + \beta_1 IPM_{it} + \beta_2 Ln(Belanja\ Modal_{it}) + \beta_3 Ln(PDRB_{it}) + \epsilon_{it}$$

Persamaan (1) menunjukkan model regresi data panel yang dipakai pada riset ini, di mana $Gini_{it}$ merepresentasikan tingkat ketimpangan pengeluaran yang dilakukan pengukuran menggunakan Indeks *Gini* dalam kabupaten ataupun kota i pada tahun t . Parameter α merupakan konstanta, sedangkan β_{-1} , β_{-2} , dan β_{-3} masing-masing menunjukkan koefisien regresi dari IPM, belanja modal, serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Variabel belanja modal dan PDRB dinyatakan dalam bentuk logaritma natural (\ln) untuk menyamakan skala antar variabel yang memiliki satuan berbeda, mengurangi potensi heteroskedastisitas, serta memungkinkan interpretasi koefisien dalam bentuk elastisitas. Sementara itu, $\varepsilon_{(it)}$ merupakan *error term* yang mencerminkan dampak aspek lainnya yang tidak ditemukan dalam model yang memberi dampak pada ketimpangan pengeluaran antar kabupaten ataupun kota dalam Provinsi DIY (Muslinawati & Sutrisno, 2024).

Berdasarkan model ekonometrika yang telah dirumuskan, pemilihan model regresi data panel dalam penelitian ini tidak hanya didasarkan pada uji statistik seperti uji *Chow* dan *Lagrange Multiplier* (LM), tetapi juga mempertimbangkan aspek teoritis. Model *Fixed Effect* (FE) tidak digunakan karena jumlah unit *cross-section* yang relatif kecil (hanya 5 kabupaten/kota), sehingga berpotensi menurunkan efisiensi estimasi akibat banyaknya parameter yang harus diestimasi. Sementara itu, model *Random Effect* (RE) memiliki asumsi bahwa efek individual tidak berkorelasi dengan variabel independen, yang dalam konteks penelitian ini sulit terpenuhi mengingat variabel seperti IPM, belanja modal, dan PDRB sangat dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing daerah. Oleh karena itu, pendekatan alternatif digunakan untuk memperoleh estimasi yang lebih sesuai. Selanjutnya, pemilihan model juga diperkuat melalui pengujian statistik menggunakan uji *Chow* dan *Lagrange Multiplier* (Sigar et al., 2021).

Selain itu, untuk mengatasi potensi masalah heteroskedastisitas dalam data panel tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan *Panel Corrected Standard Errors* (PCSE). Penggunaan PCSE dianggap lebih sesuai dalam konteks jumlah unit *cross-section* yang relatif kecil, karena metode ini mampu menghasilkan estimasi standar *error* yang lebih *robust* dibandingkan pendekatan konvensional, sehingga hasil estimasi menjadi lebih reliabel meskipun dalam sampel terbatas (Mahrani et al., 2025). Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta dokumen resmi pemerintah daerah yang relevan dan kredibel. Data dikumpulkan dalam periode 2017 hingga 2023, sehingga mampu menggambarkan dinamika ketimpangan pengeluaran serta perkembangan sosial dan perekonomian antar kabupaten/kota di Provinsi DIY secara konsisten selama tujuh tahun pengamatan.

Unit analisis pada riset ini meliputi semua kabupaten ataupun kota dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki jumlah lima wilayah, sehingga teknik pengambilan sampel yang dipakai ialah total sampling. Struktur data yang memuat observasi lintas wilayah dan waktu membentuk data panel yang memungkinkan analisis dilakukan secara lebih komprehensif. Penggunaan data panel memberikan keunggulan dikarenakan sanggup menangkap variasi antarwilayah dan perubahan kondisi dari tahun ke tahun, sehingga menghasilkan estimasi yang lebih akurat dalam mengidentifikasi hubungan antara faktor sosial-ekonomi dan ketimpangan pengeluaran (Fadila et al., 2023).

Variabel dependen pada riset ini ialah Indeks *Gini* yang didapatkan melalui publikasi Badan Pusat Statistik dan mencerminkan tingkat ketimpangan pengeluaran rumah tangga pada masing-masing kabupaten/kota. Variabel independen meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur menggunakan nilai indeks tahunan yang diterbitkan oleh BPS, belanja modal pemerintah daerah yang bersumber dari laporan keuangan daerah, serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku. Seluruh proses pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak statistik Stata versi 17.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dipakai guna memberi penggambaran awal mengenai karakteristik ketimpangan pengeluaran dan variabel penjelas antar kabupaten ataupun kota dalam Provinsi DIY sepanjang periode pengamatan. Ringkasan statistik setiap variabel dipaparkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Std.Dev	Min	Max
IGR	35	0.40	0.05	0.32	0.52
IPM	35	79.11	6.26	68.73	88.61
LnBM	35	2.47	0.13	2.16	2.69
LnPDRB	35	4.58	0.22	4.33	5.09

Sumber: Hasil *Output* StataMp 17

Berdasarkan Tabel 1, Indeks *Gini Ratio* menunjukkan variasi yang cukup lebar antar kabupaten/kota, mencerminkan adanya ketimpangan pengeluaran yang tidak merata di wilayah DIY. Kabupaten/kota dengan tingkat pembangunan ekonomi yang lebih tinggi biasanya mempunyai nilai ketimpangan yang lebih signifikan dibandingkan wilayah lainnya.

Sedangkan IPM membuktikan nilai rata-rata yang relatif tinggi dengan variasi yang lebih sempit, mengindikasikan bahwa capaian pembangunan manusia di DIY cenderung merata. Namun demikian, perbedaan kecil tersebut tetap berpotensi memengaruhi ketimpangan pengeluaran antarwilayah.

Variasi antarvariabel tersebut menunjukkan adanya perbedaan karakteristik ekonomi dan sosial antar kabupaten/kota di Provinsi DIY yang berpotensi memengaruhi tingkat ketimpangan pengeluaran. Oleh karena itu, tahap analisis selanjutnya difokuskan pada penentuan pendekatan estimasi regresi data panel yang paling sesuai sebelum dilakukan pengujian hubungan antarvariabel secara empiris.

3.2. Pemilihan Model Estimasi

Pemilihan model estimasi regresi data panel dilaksanakan guna menetapkan pendekatan yang paling tepat dalam menganalisis determinan ketimpangan pengeluaran antar kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia, belanja modal, serta Produk Domestik Regional Bruto. Hasil Tes *Chow* yang membandingkan model *Pooled Least Squares* (PLS) dan *Fixed Effect Model* (FEM) memperlihatkan nilai probabilitas sejumlah 0.2781, seperti halnya yang disajikan dalam Tabel 2. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkatan signifikansi 5 persen, alhasil model *Pooled Least Squares* dinilai lebih sesuai untuk dipakai daripada *Fixed Effect Model*.

Tabel 2. Hasil Uji *Chow Test*

<i>Fixed-effects (within) regression</i>
Prob > F = 0.2781

Sumber: Hasil *Output* StataMp 17

Selanjutnya, pemilihan model dilanjutkan dengan Uji *Lagrange Multiplier* guna membandingkan keselarasan antara model *Pooled Least Squares* dengan *Random Effect Model*. Hasil tes yang dipaparkan dalam Tabel 3 membuktikan nilai probabilitas sejumlah 1.0000, yang mengindikasikan bahwa model *Random Effect* tidak lebih sesuai daripada model *Pooled Least Squares*. Dengan demikian, berdasarkan keseluruhan hasil tes pemilihan model, estimasi regresi data panel dalam riset ini memakai pendekatan *Pooled Least Squares*.

Tabel 3. Hasil Uji *Lagrange Multiplier*

<i>Breusch and Pagan Lagrange multiplier test for random effects</i>	
Chibar2 = 0.00	
Prob > F = 1.0000	

Sumber: Hasil Output StataMp 17

3.3. Uji Asumsi Klasik

Pengujian multikolinearitas dilaksanakan guna menyelidiki tak ditemukannya korelasi yang signifikan antar variabel independen dalam model regresi. Hasil tes yang disajikan dalam Tabel 4 membuktikan bahwasanya semua variabel independen bernilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang belum mencapai ambang batas yang ditoleransi. Nilai VIF tertinggi terdapat pada variabel Indeks Pembangunan Manusia dan LnPDRB, masing-masing sebesar 3.06, sementara variabel LnBM memiliki nilai VIF sebesar 1.13. Hasil tersebut memberi indikasi bahwasanya model regresi tidak menghadapi permasalahan multikolinearitas, alhasil estimasi koefisien mampu diinterpretasikan secara reliabel.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF
LnPDRB	3.06
IPM	3.06
LnBM	1.13

Sumber: Hasil Output StataMp 17

Hasil pengujian heteroskedastisitas yang disajikan dalam Tabel 5 membuktikan nilai probabilitas *Chi-Square* sejumlah 0.0184, yang belum mencapai tingkatan signifikansi 5 persen. Temuan ini mengindikasikan adanya heteroskedastisitas dalam model regresi. Oleh karena itu, untuk memastikan konsistensi dan reliabilitas estimasi koefisien, analisa regresi data panel pada riset ini dilaksanakan melalui penggunaan pendekatan *Panel-Corrected Standard Errors* (PCSE) yang mampu mengakomodasi varians residual yang tidak konstan.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

chi2(1)	5.56
Prob > chi2	0.0184

Sumber: Hasil Output StataMp 17

Hasil uji autokorelasi yang dipaparkan pada Tabel 6 memperlihatkan nilai probabilitas *Chi-Square* sejumlah 0.3701, yang melampaui tingkatan signifikansi 5 persen. Temuan ini mengindikasikan bahwasanya tak ditemukan autokorelasi pada model regresi. Alhasil, keterkaitan *error* antarperiode tidak menjadi permasalahan dalam analisis, sehingga estimasi koefisien regresi dapat diinterpretasikan secara konsisten.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

chi2	1.018
Prob > chi2	0.3701

Sumber: Hasil Output StataMp 17

3.4. Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Estimasi regresi data panel dilaksanakan memakai pendekatan *Pooled Least Squares* (PLS) dengan penerapan *Panel-Corrected Standard Errors* (PCSE) untuk mengakomodasi adanya heteroskedastisitas dalam model. Hasil estimasi “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, belanja modal, serta Produk Domestik Regional Bruto terhadap ketimpangan pengeluaran antar kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” selama periode 2017–2023 dipaparkan dalam Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

Variabel	Koefisien	Het- Corrected Standard Error
IPM	0.0083645	0.0008128
LnBM	-0.0600598	0.0244703
LnPDRB	-0.0706365	0.0364259
C	0.2106513	0.1430878

Sumber: Hasil Output StataMp 17

Berdasarkan Tabel 7, dapat dilihat hasil estimasi PLS dengan pengelolaan data panel di atas, menunjukkan memiliki persamaan sebagai berikut:

$$IGR_{it} = 0.2106513 + 0.0083645 IPM_{it} - 0.0600598 LnBM_{it} - 0.0706365 LnPDRB_{it} + \epsilon_{it}$$

Hasil estimasi persamaan (2) menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki koefisien positif sebesar 0.0084 dan signifikan secara statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwasanya kenaikan kualitas pembangunan manusia cenderung diikuti oleh peningkatan ketimpangan pengeluaran antar kabupaten/kota di Provinsi DIY. Sementara itu, belanja modal mempunyai koefisien negatif sejumlah -0.0601 serta signifikan, yang menunjukkan bahwasanya kenaikan belanja modal daerah berperan dalam menurunkan tingkat ketimpangan pengeluaran. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga menunjukkan koefisien negatif sebesar -0.0706, meskipun signifikansinya berada pada tingkat yang lebih lemah.

Signifikansi dampak parsial setiap variabel independen terhadap Indeks *Gini Ratio* diuji menggunakan statistik z berdasarkan hasil estimasi regresi *Pooled Least Squares*. Hasil uji z yang disajikan pada Tabel 8 menunjukkan adanya perbedaan tingkat signifikansi antarvariabel dalam menjelaskan variasi ketimpangan pengeluaran antar kabupaten ataupun kota dalam Provinsi DIY.

Tabel 8. Hasil Uji z

Variabel	z	P>{ t }
IPM	10.29	0.000
LnBM	-2.45	0.014
LnPDRB	-1.94	0.052
C	1.47	0.141

Sumber: Hasil Output StataMp 17

Berdasarkan hasil uji z pada Tabel 8, variabel IPM menunjukkan nilai statistik z sejumlah 10.29 dan probabilitas 0.000, yang mengindikasikan bahwa IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pengeluaran. Belanja modal juga berpengaruh signifikan dengan nilai probabilitas sebesar 0.014, sehingga peningkatan belanja modal daerah berkaitan dengan perubahan tingkat ketimpangan pengeluaran. Sementara itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.052, yang sedikit melebihi tingkat signifikansi 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PDRB berpengaruh negatif terhadap Indeks *Gini Ratio*, pengaruh tersebut belum signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Signifikansi pengaruh variabel independen secara simultan terhadap ketimpangan pengeluaran diuji menggunakan statistik *Wald Chi²*. Hasil pengujian pada Tabel 9 menunjukkan nilai *Wald Chi²* sebesar 175.95 dan probabilitas 0.0000, yang belum mencapai tingkatan signifikansi 5 persen. Temuan tersebut memberikan indikasi bahwasanya IPM, belanja modal, serta PDRB dengan cara bersamaan berpengaruh signifikan pada variasi Indeks *Gini Ratio* antar kabupaten/kota di Provinsi DIY.

Tabel 9. Hasil Uji *Wald Chi²*

Wald chi2(2)	175.95
Prob > chi2	0.0000

Sumber: Hasil *Output StataMp 17*

Selain signifikansi simultan, kemampuan model dalam menjelaskan variasi ketimpangan pengeluaran mampu diamati lewat nilai koefisien determinasi.

Kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi ketimpangan pengeluaran dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi. Berdasarkan Tabel 10, nilai R-squared sejumlah 0.7563 memperlihatkan bahwa sekitar 75.63 persen variasi Indeks *Gini Ratio* antar kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2017–2023 dapat dijelaskan oleh IPM, belanja modal, serta Produk Domestik Regional Bruto. Temuan ini mengindikasikan bahwa model memiliki daya jelaskan yang relatif kuat, sementara sisanya sebesar 24.37 persen diberi pengaruh melalui faktor lainnya yang tidak ditemukan dalam model yang tidak tercakup pada riset ini.

Tabel 10. Hasil Koefisien Determinasi

R-squared	0.7563
-----------	--------

Sumber: Hasil *Output StataMp 17*

3.5. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pengeluaran (IGR)

Hasil uji *z* membuktikan bahwasanya IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pengeluaran di kabupaten/kota Provinsi DIY. Perihal tersebut tercermin dari nilai statistik *z* sebesar 10.29 dengan tingkat signifikansi *p-value* sejumlah 0.000. Secara empiris, temuan ini memberi indikasi bahwasanya peningkatan IPM cenderung diikuti oleh peningkatan Indeks *Gini Ratio*, sehingga ketimpangan pengeluaran antarwilayah semakin melebar.

Pola hubungan tersebut dapat diberi penjelasan lewat teori *Kuznets Inverted U-Curve*, yang memberi pernyataan bahwasanya dalam tahapan pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan aktivitas ekonomi lebih terkonsentrasi di wilayah yang telah maju. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan antarwilayah meningkat sebelum akhirnya menurun seiring dengan pemerataan pembangunan dalam jangka panjang (Zaremba, 2024).

Temuan penelitian ini konsisten dengan bukti empiris dari Agustina dan Anam (2021), yang menganalisis data panel di Pulau Jawa dan menemukan bahwa *Human Development Index* berpengaruh positif dan signifikan pada ketimpangan pendapatan antarwilayah, memberi indikasi bahwasanya peningkatan kualitas hidup yang tidak merata dapat berkorelasi dengan peningkatan ketimpangan dalam konteks regional tertentu.

Dukungan empiris juga disampaikan oleh Octavia et al. (2024) yang merangkum berbagai studi di Pulau Jawa dan menemukan bahwasanya IPM cenderung berpengaruh positif dan signifikan pada ketimpangan pendapatan dalam sejumlah provinsi, termasuk Jawa Timur. Hasil tersebut menguatkan indikasi bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia belum secara otomatis menurunkan ketimpangan, terutama ketika distribusi pembangunan masih timpang secara spasial.

Dalam konteks Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, percepatan peningkatan IPM yang lebih terkonsentrasi di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta dibandingkan Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo berkontribusi terhadap pelebaran ketimpangan pengeluaran. Oleh karena itu, peningkatan IPM perlu disertai dengan penguatan aktivitas ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah tertinggal agar manfaat pembangunan manusia dapat dirasakan secara lebih merata.

3.6. Pengaruh Belanja Modal terhadap Ketimpangan Pengeluaran (IGR)

Belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pengeluaran antar kabupaten/kota di Provinsi DIY. Perihal tersebut dipaparkan melalui nilai statistik *z* sejumlah -2.45 dan memiliki tingkatan signifikansi *p-value* sejumlah 0.014. Secara kuantitatif, peningkatan belanja modal sebesar satu persen cenderung menurunkan Indeks *Gini Ratio* sekitar 0.06 persen. Temuan ini

mengindikasikan bahwa belanja modal berperan dalam mereduksi ketimpangan pengeluaran melalui peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan layanan publik.

Secara teoritis, hasil penelitian ini sejalan dengan konsep *investment for equity*, yang menekankan bahwa alokasi belanja publik berbasis infrastruktur dan pelayanan strategis dapat memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas ekonomi, sosial, dan layanan publik. Dengan demikian, peningkatan belanja modal pemerintah daerah berpotensi memperkecil kesenjangan antarwilayah, khususnya ketika diarahkan pada wilayah yang relatif tertinggal (Benardin & Anitasari, 2023).

Riset ini selaras terhadap riset yang dilaksanakan Margareta et al. (2023) yang menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah daerah, khususnya dalam bidang pembangunan serta infrastruktur, berpengaruh negatif pada ketimpangan pembangunan antarwilayah. Studi tersebut menegaskan bahwa belanja pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan ekonomi regional.

Dalam konteks Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, belanja modal yang difokuskan pada pemerataan layanan publik, terutama pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo, berkontribusi dalam menurunkan ketimpangan pengeluaran antar kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas belanja modal dalam mengurangi ketimpangan sangat bergantung pada arah dan prioritas alokasi anggaran pemerintah daerah.

3.7. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Ketimpangan Pengeluaran (IGR)

Produk Domestik Regional Bruto yang direpresentasikan oleh logaritma natural PDRB ($\ln PDRB$) menunjukkan pengaruh negatif tetapi tidak signifikan pada ketimpangan pengeluaran antar kabupaten/kota di Provinsi DIY. Hal tersebut tercermin dari nilai statistik z sebesar $-1,94$ dengan tingkat signifikansi p -value sejumlah $0,052$, yang diperoleh sedikit melampaui batasan signifikansi 5 persen. Riset ini mengindikasikan bahwa peningkatan PDRB daerah cenderung menurunkan ketimpangan pengeluaran, namun pengaruh tersebut belum cukup kuat dari segi statistik.

Secara teoritis, hasil ini selaras dengan konsep *growth without equity*, yaitu kondisi ketika peningkatan aktivitas dan *output* ekonomi tidak diikuti oleh pemerataan distribusi kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi pada sektor atau wilayah tertentu berpotensi meningkatkan pendapatan agregat tanpa memberikan dampak signifikan terhadap penurunan ketimpangan pengeluaran (Sari & Santoso, 2025).

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian Yulikasari dan Samsuddin (2025) yang menganalisis korelasi antara PDRB per kapita dengan ketimpangan wilayah di Indonesia menggunakan pendekatan data panel. Hasil riset tersebut membuktikan bahwasanya PDRB per kapita memiliki hubungan negatif pada ketimpangan, namun tidak signifikan dari segi statistik. Riset ini menguatkan indikasi bahwasanya penambahan *output* ekonomi regional belum secara otomatis mampu menurunkan ketimpangan pengeluaran apabila pertumbuhan tersebut tidak bersifat inklusif.

Dalam konteks Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, peningkatan PDRB terutama didorong oleh sektor pariwisata, jasa, dan perdagangan yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, khususnya Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Kondisi ini menyebabkan manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menyebar ke kabupaten dengan struktur ekonomi berbasis sektor primer seperti Gunungkidul dan Kulon Progo, sehingga peningkatan PDRB belum mampu secara optimal menurunkan ketimpangan pengeluaran antarwilayah.

Kondisi tersebut juga dapat mengindikasikan bahwa *trickle-down effect* dari pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY belum berjalan secara optimal. Peningkatan *output* ekonomi yang terkonsentrasi pada wilayah perkotaan belum sepenuhnya menetes ke wilayah pinggiran maupun

rumah tangga berpendapatan rendah. Dengan demikian, kenaikan PDRB regional belum secara langsung tercermin dalam penurunan ketimpangan pengeluaran antar kabupaten/kota.

Selain itu, ketidaksignifikanan pengaruh PDRB juga dapat dipengaruhi oleh dominasi aktivitas ekonomi informal yang belum seluruhnya tercatat dalam indikator PDRB, namun tetap berkontribusi terhadap pola pengeluaran rumah tangga. Kondisi ini cukup relevan pada beberapa wilayah di DIY yang masih memiliki basis usaha mikro, perdagangan kecil, serta sektor informal rumah tangga, sehingga ukuran PDRB belum sepenuhnya merepresentasikan tingkat kesejahteraan riil masyarakat.

4. Kesimpulan

Riset ini melakukan analisis dampak IPM, belanja modal, serta PDRB terhadap ketimpangan pengeluaran antar kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang periode 2017–2023. Hasil riset membuktikan bahwasanya IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pengeluaran, yang memberi indikasi bahwasanya peningkatan kualitas pembangunan manusia belum sepenuhnya disertai pemerataan manfaat pembangunan antarwilayah. Sebaliknya, belanja modal pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pengeluaran, sehingga berperan penting dalam menekan disparitas pengeluaran melalui pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Sementara itu, PDRB berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pengeluaran, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum secara langsung mampu mengurangi ketimpangan apabila tidak bersifat inklusif. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa pengurangan ketimpangan pengeluaran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memerlukan kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan berbasis wilayah. Pemerintah Daerah DIY disarankan untuk mengalokasikan belanja modal secara lebih proporsional dan asimetris ke wilayah yang relatif tertinggal, seperti Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul, guna mengurangi ketimpangan yang dipicu oleh konsentrasi pembangunan di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Selain itu, peningkatan kualitas pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi perlu diarahkan agar lebih inklusif sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata antarwilayah.

References

- Agustina, D. T., & Anam, M. S. (2020). Analysis of Income Inequality in Java Island and Its Influencing Factors in 2012- 2023. *Media Trend*, 15(2), 217-226. <https://doi.org/10.21107/mediatrend>
- Aliyah, A. H., & Rahmawati, F. (2024). Analisis determinan tingkat ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2016-2022. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 19(4), 2085-1960. <https://doi.org/10.22437/jpe.v19i4.38175>
- Benardin, & Anitasari, M. (2023). Pengaruh Dana Desa Dan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Pulau Jawa Dan Sumatera. *The Journal of Economic Development*, 5(2), 168-179. <https://doi.org/10.33369/convergencejep.v5i2.33087>
- Canina, L., Sodik, J., & Nuryadin, D. (2022). Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota Dan Keterkaitan Spasial (Studi Kasus: D.I. Yogyakarta Tahun 2013-2020). *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(5), 737-754. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.79>
- Fadila, F. H. N., Ulhaq, N. H. D., Khoir, R. A., & Al Fatih, S. M. (2023). Analisis Data Panel dalam Memprediksi Faktor Determinan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 6(1), 303-314. <https://jiep.ulm.ac.id/index.php/jiep/article/view/2475/462>
- Juliana, R., & Soelistyo, A. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Pad, Ipm, Dan Umk Terhadap Ketimpangan Di Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 3(2), 293-300. <https://doi.org/10.22219/jie.v3i2.8232>
- Mangiri, N. J. S., & Sasabone, L. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2017-2023. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 7(2), 1346-1352. <https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.5307>

- Margaretta, Iranto, D., & Nikensari, S. I. (2023). The Effect Of Local Government Expenditure On Development Inequality Within And Outside Java Island. *Jurnal Pendidikan*, 4(2), 226-232. <https://doi.org/10.21009/jpepa.0501.14>
- Muslinawati, R., & Sutrisno. (2024). Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(1), 1558-1571. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.5987>
- Octavia, E. C., Firmansyah, A. A., Fatmala, D. R., Aisa, S. N., Ma'ruf, A., & Hamzah, A. F. (2024). The Nexus of Economic Growth, *Human Development Index*, and Unemployment to Income Inequality in East Java. *Global Economics, Social, and Development Review*, 28(2), 1-11. <https://doi.org/10.24123/gesdr.v28i2.7002>
- Pasulu, G. N. T., & Mustika, M. D. S. (2025). Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Klasifikasi Wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 5(4), 333-357. <https://doi.org/10.55606/optimal.v5i4.7850>
- Purnama, H. R., Rahman, Z., Ibrahim, F. N., & Tajuddin, I. (2024). Dampak Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Wilayah di Sulawesi Selatan (Tahun 2017-2022). *Jesyra*, 7(1), 171-183. <https://doi.org/10.36778/jesyra.v7i1.1474>
- Raharjo, D., & Wirahayu, Y. A. (2025). Analisis Ketimpangan Pembangunan Sektor Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2023. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 6, 946-952. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i2>
- Sari, P. H., & Santoso, R. P. (2025). Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan di Indonesia periode 2012-2023. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 3(2), 220-226. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol3.iss2.art12>
- Sigar, B. R., Tulis, D. H., Wijaya, Y. N., Pangauw, K. A. I., & Ramadhani, N. F. (2021). Analisis Hubungan Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk, Dan Perekonomian Terhadap Timbulan Sampah Di Sulawesi Utara. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 32(3), 167-186. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i1>
- Yulikasari, & Samsuddin, M. A. (2025). Analisis Dinamis Hubungan Antara Kepadatan Penduduk, PDRB Per Kapita, dan Ketimpangan Wilayah di Indonesia. *Moneter: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3(3), 352-362. <https://doi.org/10.61132/moneter.v3i3.1594>
- Zaremba, M. (2024). The Economic Growth and Income Inequality: Verification Of The Kuznets Curve For Socialist Asian Countries. *International Journal of Public Administration, Management and Economic Development*, 9(1), 55-70. <https://doi.org/10.60026/ijpamed.v9i1.179>